

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan Inflasi Daerah Dan atau Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok, Barang Penting atau Barang Lainnya Serta Resiko Kedepan di Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

1. Cadangan pangan Pemerintah (CPP) Kabupaten Lampung Barat yang ada di gudang Bulog Liwa per tanggal 19 Maret 2025 sebanyak 4049 kg.
2. Penyaluran Beras Melalui Program SPHP (Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan) yang di salurkan oleh Bulog melalui Mitra Toko Pangan Kita (TPK) Sampai dengan saat ini di Kabupaten Lampung Barat terdapat 90 TPK yang Tesebar di wilayah Kabupaten Lampung Barat dialokasikan Beras setiap minggu 1000 kg (1ton) Per Minggu Per
3. Kebutuhan Barang pokok penting seperti Beras, Cabai, Minyak Goreng, Bawang, Daging serta sayuran tidak mengalami perubahan harga yang signifikan dan stok di pasaran tetap stabil.
4. Produktivitas hasil petani terus ditingkatkan dengan menyiapkan bibit yang cocok untuk perubahan iklim.

Indeks Perkembangan Harga (IPH) Mingguan Kab. Kabupaten Lampung Barat 2025: Januari (3,68), Februari (-0,58), Maret (1,43)

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Lampung Barat Triwulan I adalah sebagai berikut :

1. Pengurangan lahan pertanian sebagai akibat beralih fungsinya lahan ke sektor yang lain seperti perikanan (pembuatan kolam ikan) dan kurangnya jumlah petani sehingga rendahnya produktivitas pertanian.
2. Adanya perubahan iklim yang dapat mempengaruhi produksi dan distribusi pangan dikarenakan sangat sulit diprediksi.
3. Belum memadainya infrastruktur pendukung pertanian
4. Kurangnya jumlah petani dan juga lahan pertanian sehingga rendahnya produktivitas pertanian.
5. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi pada masyarakat petani sehingga menjadikan hasil produksi yang tidak maksimal.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kebijakan Pengendalian inflasi yang telah dilaksanakan di Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

1. Memastikan keterjangkauan harga, dengan cara menjaga daya beli masyarakat dengan adanya Bantuan Sosial, Subsidi BLT serta Penguatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dengan memastikan kelancaran distribusi

melalui perluasan pemasaran melalui platform digital, mendorong kemitraan dan Kerjasama antar daerah (KAD) surplus.

2. Gerakan Pangan Murah (GPM) yang di Rencanakan 15 titik/ Lokasi.
3. Polres Lampung Barat bersama dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait melaksanakan kegiatan Launching Penanaman Jagung Serentak 1 Juta Hektar dalam rangka mendukung program swasembada pangan nasional, Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 22 Januari 2025 di Pekon Sebarus, Kecamatan Balik Bukit.
4. Melaksanakan Sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, Monitoring Menjelang Idul Fitri pada tanggal 24 - 27 Maret 2025, Monitoring Menjelang Bulan Suci Ramadhan pada tanggal 24 - 28 Februari 2025.

#### 4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

1. TPID, BULOG, Satgas Pangan perlu terus berkoordinasi guna memastikan ketersediaan komoditas, kelancaran distribusi, dan fluktuasi harga.
2. Mengantisipasi disparitas harga komoditas Holtikultura saat periode panen raya dengan terus menjalin kerjasama antar daerah, mengingat Kabupaten Lampung Barat merupakan sentra produksi hor
3. Kementrian pertanian diharapkan membuat terobosan terobosan untuk lompatan peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah produk pertanian walaupun lahan terbatas.

#### 5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

1. Upaya perbaikan dan perawatan jalan sebagai akses distribusi pangan pokok dan peningkatan kualitas sarana serta prasarana lainnya dalam mendukung distribusi pangan keseluruh wilayah yang ada di Kabupaten Lampung Barat.
2. Mengoptimalkan Tim Koordinasi/ TPID secara konsisten dan bersama-sama memantau perkembangan harga pasar dan harga produsen, agar tidak terjadi margin yang terlalu tinggi antara harga tingkat produsen agen dengan harga pasar/
3. Upaya memperpendek jalur distribusi pangan untuk mengurangi biaya transportasi dengan cara bekerjasama dengan produsen-produsen yang ada.